

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil tinjauan Modul Penerimaan Negara atas Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Binjai yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam penilaian proses bisnis sistem penerimaan KPP Pratama Binjai MPN-G3 terdapat 5 langkah utama yang meliputi proses penagihan kepada wajib pajak, proses pembayaran wajib pajak, proses rekonsiliasi, proses pelimpahan pendapatan negara dan proses pelaporan pendapatan negara. Sesuai tinjauan penulis, KPP Pratama Binjai telah memenuhi proses bisnis teoritis dan peraturan yang berlaku.
2. Fungsi terkait proses bisnis Sistem Penerimaan MPN G3 yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Binjai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Bidang Kepengurusan Umum Fungsi terkait pajak, departemen yang bertanggung jawab. Selama pelaksanaan MPN-G3, KPP Pratama Binjai menjalankan fungsi melayani dan mengurus Wajib Pajak, fungsi pengelolaan dan penyelenggaraan penerimaan pajak, fungsi pemeriksaan pajak, fungsi pemeriksaan pajak dan fungsi pemungutan pajak.

3. Dokumen penting yang berperan dalam proses bisnis pelaksanaan sistem penerimaan MPN-G3 di KPP Pratama, antara lain cetakan kode *billing*, bukti penerimaan negara (BPN), Lembar Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP), Laporan Pendapatan Harian (LPH) dan laporan keuangan bulanan. Dokumen ini berlaku untuk memverifikasi jumlah nominal penerimaan negara KPP Pratama Binjai.
4. Melihat efisiensi penerimaan negara melalui MPN-G3 di KPP Pratama Binjai, hal ini terlihat melalui penerimaan negara yang diterima instansi, pada tahun 2019, 2020 dan 2021 masih memenuhi target rencana penerimaan pemerintah. Meski pertumbuhan tahun 2021 akan negatif 2,08%, namun tidak berpengaruh terhadap penerimaan negara dan pandemi Covid-19 tidak mempengaruhi penerimaan negara di KPP Pratama Binjai.
5. KPP Pratama Binjai menerapkan pengendalian internal pada sistem perpajakan negara MPN-G3 untuk mencegah terjadinya *fraud* dan *human error* yang biasa terjadi. KPP Pratama Binjai juga menerapkan desentralisasi dan pemisahan kekuasaan pada portal MPN-G3 untuk menghindari *human error*.